

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SAMARINDA)**

JURNAL SKRIPSI

Oleh:

**NONCE HULAU DIAN
1001035429**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2017**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SAMARINDA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SAMARINDA**

Nonce Dian

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Dr. Hj. Yana Ulfah SE.,M.Si.,Ak.,CA

Dhina Mustika Sari SE.,M.SA.,Ak.,CA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda,
Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

E-mail: noncedian@gmail.com

ABSTRAK

Nonce Dian. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Dibimbing oleh: Ibu Hj. Yana Ulfah dan Ibu Dhina Mustika Sari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 38 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf atau karyawan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan program SPSS 20. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTACT

Nonce Dian. Factors Influencing Local Government Financial Statement Quality In Samarinda. Supervised by: Mrs. Hj. Yana Ulfah and Mrs. Dhina Mustika Sari.

This study aims to determine factors influencing local government financial statement quality in samarinda. Factors examined include competency of human resources, internal control system, and implementation of government accounting standards. Data collection

is done by giving as 38 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who are staff of the office of financial management and assets in Samarinda. The data obtained are then analyzed using SPSS 20. The result showed that competency of human resources and internal control system do not affect on local government financial statement quality, while implementation of government accounting standards have significant positive impact to the quality of local government financial reports.

Key Words: Competency Of Human Resources, Internal Control System, Implementation Of Government Accounting Standards, Local Government Financial Statement Quality.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin majunya perkembangan jaman saat ini kualitas kinerja pemerintah menjadi hal penting untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memang menjadi harapan setiap lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Mengingat penting dan besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan prinsip akuntansi guna mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah.

Meningkatnya tuntutan terhadap laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih memiliki andil dalam hal mengelola sumber daya keuangannya. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance government). Hal ini dapat diwujudkan pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang artinya, pemerintah harus mampu menyajikan Laporan keuangan secara lebih transparan, akuntabel dan sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi acuan penentuan laporan keuangan yang berkualitas. Sebuah laporan keuangan yang berkualitas artinya harus memenuhi unsur-unsur atau karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan tidak memenuhi karakteristik yang disyaratkan, maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan mulai dari kerugian daerah, potensi

kekurangan penerimaan daerah, kelemahan administrasi, sampai dengan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kalimantan Timur sendiri memang selama beberapa tahun terakhir mendapat peningkatan opini dari predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa laporan keuangan pemerintah Kalimantan Timur bebas dari kesalahan. BPK memberikan opini WTP dengan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur. Diantaranya kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, ketidakpatuhan, serta kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang masih belum memadai.

Untuk laporan keuangan pemerintah Kota Samarinda sendiri juga memang selama tiga tahun berturut-turut (2014, 2015, dan 2016) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dengan sejumlah catatan yang masih perlu ditindaklanjuti. Beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti antara lain masalah pendataan dan pencatatan aset, permasalahan utang dan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). BPK memberikan opini WTP kepada pemerintah Kota Samarinda karena semua kebutuhan audit bisa terpenuhi. BPK juga menilai Pemkot masih kurang transparan dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu BPK menganjurkan bahwa nilai anggaran harus dipublikasi agar jelas pengeluaran dan pendapatan dan diketahui publik hal ini untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut mulai dari kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal yang baik, sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sampai dengan pengawasan berkala terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang mampu memenuhi unsur-unsur kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang andal dan berkompeten, memiliki sistem pengendalian internal yang baik, serta menerapkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua elemen tersebut lemah maka akan menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang relevan dan andal, terutama dalam pembuatan keputusan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu: Afrianti (2011), Harto dan Ningrum (2010), Rama dan Wayan (2014), Windiastuti (2013), dan Nurillah (2014). Mengacu Pada Penelitian terdahulu bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, serta masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan terkait dengan kualitas laporan keuangan membuat penulis

tertarik untuk meneliti kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Teori

1. Teori Entitas

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono dalam Nurlaila, 2014), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam penyajian informasi akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut,

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

2. Teori Kegunaan-Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan-keputusan (*decision-usefulness*) adalah Chambers. Ia mengatakan sebagai berikut:

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlakun di Amerika Serikat (staubus 2000). Pada tahap awal teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors* (Staubus 2003). Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuanganyang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga merupakan elemen yang menentukan perkembangan Sumber daya manusia (*human resources*) merupakan orang-orang di dalam organisasi yang menjalankan semua kegiatan di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan suatu organisasi. Sekarang ini, sumber daya manusia bahkan bukan dipandang sebagai sumber daya (*human resouce*) belaka, melainkan sebagai aset atau modal (*human capital*) bagi sebuah organisasi atau institusi. Secara garis besar, Pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penggerak organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui

manajemen sumber daya manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia yang biasa disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan (*goal*) bersama organisasi. Manajemen sumber daya manusia juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia suatu organisasi.

Berikut beberapa indikator yang menjadi tolak ukur kompetensi sumber daya manusia, antara lain:

1. Pendidikan formal
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Pengalaman kerja

C. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi dalam hal keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam lingkungan pemerintahan Sistem Pengendalian Intern disebut SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Internal. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyatakan bahwa :

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat menjadi SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah:

- a) Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
- b) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
- d) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).
- e) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi
- f) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.
- g) Pengendalian Intern pada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut PP Nomor 60

tahun 2008 tentang SPIP ini Sistem Pengendalian Internal meliputi lima unsur pengendalian, yaitu :

- h) 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*)
- i) 2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)
- j) 3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
- k) 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- l) 5. Pemantauan (*Monitoring*)

D. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka mewujudkan transparansi akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP). SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

E. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusansumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No,71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Nurillah, 2014).

F. Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang disyaratkan dalam Peraturan

Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

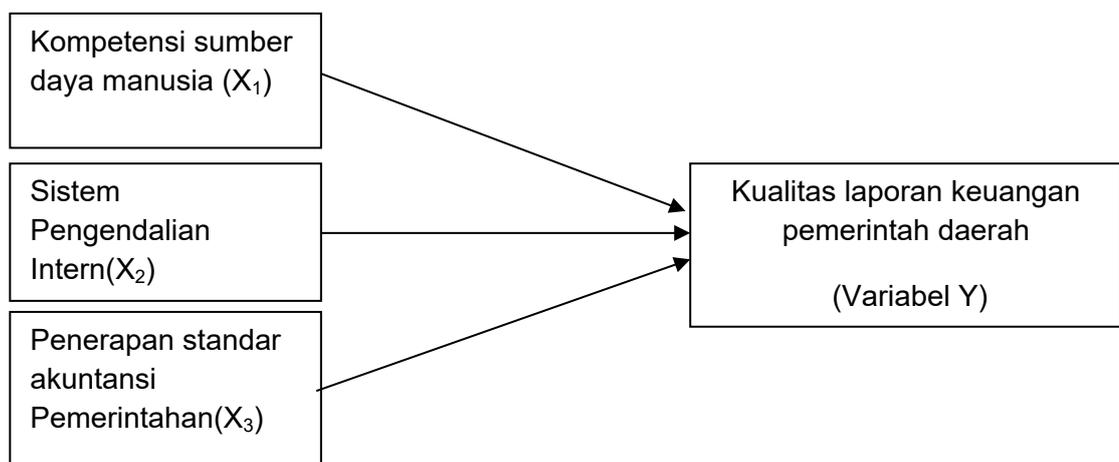
4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual dan Model Penelitian



H. Hipotesis Penelitian

1. H₁: Kompetensi daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. H₃: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

III. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen ini sering juga disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, dan variabel konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Samarinda.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan sebuah skala yang tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya dalam beberapa cara yang berarti (Sekaran, 2006). Teknik pengukuran yang digunakan adalah skala likert (*likert scale*). Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, dimana responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sebenarnya. Berikut ini model skala likert yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan responden, yaitu:

- Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
- Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
- Skor 3 untuk jawaban Ragu-ragu (R)
- Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
- Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:75). Populasi dalam penelitian adalah staf yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang berjumlah 125 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2011:76). Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *non probability sampling*.

Berdasarkan populasi di atas, peneliti tidak melakukan penelitian kepada seluruh karyawan yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda tetapi hanya mengambil sampel pada staf bagian akuntansi atau keuangan saja.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*field Research*)
 - a. Kuesioner, metode kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan dengan memberikan beberapa pilihan jawaban yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda
 - b. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen, literatur dan buku-buku yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, artikel, situs web, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif Responden

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	15	42%
wanita	21	58%
Total	36	100%

Sumber: Data primer diolah

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak yakni sebesar 58% dibandingkan responden laki-laki yang hanya sekitar 42%.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

usia	Jumlah	Presentase
20-30 Tahun	10	28%
31-40 Tahun	14	39%
41-50 Tahun	12	33%
>50 Tahun	-	-
Total	36	100%

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas terlihat bahwa responden dengan usia 20-30 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 28%, responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 14 orang atau dengan presentase sebesar 38%, responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 12 orang atau memiliki presentase sebesar 32%, sedangkan untuk responden dengan usia > 50 tahun tidak ada.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Tabel 4.3

Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1-10 Tahun	11	31%
11-20 Tahun	12	33%
21-30 Tahun	9	25%
>30 Tahun	4	11%
Total	36	100%

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa jumlah responden yang memiliki masa bekerja antara 1-10 tahun sebanyak 11 orang atau dengan presentase sebesar 31%, responden yang masa kerjanya antara 11-20 tahun sebanyak 12 orang atau dengan presentase sebesar 33%, responden yang masa kerjanya antara 21-30 tahun sebanyak 9 orang atau dengan presentase sebesar 25%, dan responden dengan masa bekerja diatas 30 tahun sebanyak 4 orang atau dengan presentase sebesar 11%.

B. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4.4

Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas Laporan Keuangan	4.3056	.22843	36
Sumber Daya Manusia	4.0185	.31567	36
Sistem Pengendalian Internal	4.2257	.26359	36
Standar Akuntansi Pemerintahan	4.2685	.27394	36

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian (N) adalah sebanyak 36 data. Nilai rata-rata variabel kualitas laporan keuangan adalah sebesar 4,3056 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,22843. Nilai rata-rata variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 4,0185 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,31567. Nilai rata-rata variabel sistem pengendalian Internal adalah sebesar 4,2257 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,26359. Nilai rata-rata variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 4,2685 dengan standar deviasi sebesar 0,27394.

C. Uji Kompetensi Data

1. Uji Validitas

Taraf signifikansi untuk uji Validitas adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Instrumen penelitian dikatakan Valid apabila nilainya kurang dari 5% (< 0,05).

Hasil uji Validitas untuk masing-masing akan ditunjukkan melalui tabel-tabel berikut ini.

a. Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya Manusia (X1)

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya Manusia

		Correlations						
		Sumber Daya Manusia1	Sumber Daya Manusia2	Sumber Daya Manusia3	Sumber Daya Manusia4	Sumber Daya Manusia5	Sumber Daya Manusia6	Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia1	Pearson Correlation	1	.218	.391	.350	.470	.503	.702
	Sig. (2-tailed)		.201	.019	.036	.004	.002	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Sumber Daya Manusia2	Pearson Correlation	.218	1	.275	-.190	.042	-.120	.380
	Sig. (2-tailed)	.201		.104	.268	.807	.486	.022
	N	36	36	36	36	36	36	36
Sumber Daya Manusia3	Pearson Correlation	.391	.275	1	.330	.140	.204	.689
	Sig. (2-tailed)	.019	.104		.049	.416	.234	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Sumber Daya Manusia4	Pearson Correlation	.350	-.190	.330	1	.213	.892	.532
	Sig. (2-tailed)	.036	.268	.049		.212	.000	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36
Sumber Daya Manusia5	Pearson Correlation	.470	.042	.140	.213	1	.378	.574
	Sig. (2-tailed)	.004	.807	.416	.212		.023	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Sumber Daya Manusia6	Pearson Correlation	.503	-.120	.204	.892	.378	1	.605
	Sig. (2-tailed)	.002	.486	.234	.000	.023		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	.702	.380	.689	.532	.574	.605	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.022	.000	.001	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel sumber daya manusia yaitu pernyataan nomor 1 sampai ke 6 secara berturut-turut yaitu 0,000, 0,022, 0,000, 0,001, 0,000, dan 0,000. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian untuk variabel X₁ valid karena hasilnya kurang dari taraf signifikansi (α)= 5% ($< 0,05$). Jadi kesimpulannya butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 valid.

b. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2)

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

		Correlations								
		Sistem Pengendalian Internal1	Sistem Pengendalian Internal2	Sistem Pengendalian Internal3	Sistem Pengendalian Internal4	Sistem Pengendalian Internal5	Sistem Pengendalian Internal6	Sistem Pengendalian Internal7	Sistem Pengendalian Internal8	Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal1	Pearson Correlation	1	.219	.204	-.298	.219	.316	.436	.204	.350
	Sig. (2-tailed)		.199	.232	.077	.199	.060	.008	.232	.037
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal2	Pearson Correlation	.219	1	.696	.142	.031	.693	.333	.050	.714
	Sig. (2-tailed)	.199		.000	.408	.859	.000	.047	.771	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal3	Pearson Correlation	.204	.696	1	.185	-.079	.491	.166	-.204	.543
	Sig. (2-tailed)	.232	.000		.281	.647	.002	.334	.233	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal4	Pearson Correlation	-.298	.142	.185	1	.007	.229	.093	.059	.416
	Sig. (2-tailed)	.077	.408	.281		.965	.179	.590	.731	.012
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal5	Pearson Correlation	.219	.031	-.079	.007	1	.194	.432	.050	.386
	Sig. (2-tailed)	.199	.859	.647	.965		.257	.009	.771	.020
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal6	Pearson Correlation	.316	.693	.491	.229	.194	1	.552	.375	.863
	Sig. (2-tailed)	.060	.000	.002	.179	.257		.000	.024	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal7	Pearson Correlation	.436	.333	.166	.093	.432	.552	1	.257	.721
	Sig. (2-tailed)	.008	.047	.334	.590	.009	.000		.130	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal8	Pearson Correlation	.204	.050	-.204	.059	.050	.375	.257	1	.376
	Sig. (2-tailed)	.232	.771	.233	.731	.771	.024	.130		.024
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	.350	.714	.543	.416	.386	.863	.721	.376	1
	Sig. (2-tailed)	.037	.000	.001	.012	.020	.000	.000	.024	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Sumber: Output Program SPSS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal yaitu pernyataan nomor 1 sampai nomor 8 secara berturut-turut yaitu 0,037, 0,000, 0,001, 0,012, 0,020, 0,000, 0,000, dan 0,024. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian untuk variabel X_2 valid karena hasilnya kurang dari taraf signifikansi (α)= 5% ($< 0,05$). Jadi kesimpulannya butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valid.

c. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (X3)

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

		Correlations						
		Standar Akuntansi Pemerintahan 1	Standar Akuntansi Pemerintahan 2	Standar Akuntansi Pemerintahan 3	Standar Akuntansi Pemerintahan 4	Standar Akuntansi Pemerintahan 5	Standar Akuntansi Pemerintahan 6	Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan1	Pearson Correlation	1	.594**	.167	.281	.176	.102	.641**
	Sig. (2-tailed)		.000	.331	.096	.305	.554	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Standar Akuntansi Pemerintahan2	Pearson Correlation	.594**	1	.237	.404	.294	.116	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000		.164	.015	.082	.501	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Standar Akuntansi Pemerintahan3	Pearson Correlation	.167	.237	1	.409	.164	.059	.498**
	Sig. (2-tailed)	.331	.164		.013	.340	.731	.002
	N	36	36	36	36	36	36	36
Standar Akuntansi Pemerintahan4	Pearson Correlation	.281	.404	.409	1	.625**	.298	.715**
	Sig. (2-tailed)	.096	.015	.013		.000	.077	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Standar Akuntansi Pemerintahan5	Pearson Correlation	.176	.294	.164	.625**	1	.298	.461**
	Sig. (2-tailed)	.305	.082	.340	.000		.077	.005
	N	36	36	36	36	36	36	36
Standar Akuntansi Pemerintahan6	Pearson Correlation	.102	.116	.059	.298	.298	1	.568**
	Sig. (2-tailed)	.554	.501	.731	.077	.077		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	.641**	.707**	.498**	.715**	.461**	.568**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.005	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36

Sumber: Outpot Program SPSS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel sumber penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu pernyataan nomor 1 sampai ke 6 secara berturut-turut yaitu 0,000, 0,000, 0,002, 0,000, 0,005, dan 0,000. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian untuk variabel X_3 valid karena hasilnya kurang dari taraf signifikansi (α)= 5% ($< 0,05$). Jadi kesimpulannya butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 valid.

d. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Correlations

		Kualitas Laporan Keuangan1	Kualitas Laporan Keuangan2	Kualitas Laporan Keuangan3	Kualitas Laporan Keuangan4	Kualitas Laporan Keuangan5	Kualitas Laporan Keuangan6	Kualitas Laporan Keuangan7	Kualitas Laporan Keuangan8	Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas Laporan Keuangan1	Pearson Correlation	1	.369	.184	-.034	.269	.065	.089	.416	.404
	Sig. (2-tailed)		.027	.283	.842	.113	.707	.604	.012	.015
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan2	Pearson Correlation	.369	1	.157	.593 ^{**}	.055	.255	.229	.369	.717 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.027		.361	.000	.748	.134	.179	.027	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan3	Pearson Correlation	.184	.157	1	.131	.009	.040	.131	.040	.385
	Sig. (2-tailed)	.283	.361		.446	.960	.817	.446	.817	.020
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan4	Pearson Correlation	-.034	.593 ^{**}	.131	1	-.007	.089	-.047	-.158	.472 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.842	.000	.446		.965	.604	.784	.357	.004
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan5	Pearson Correlation	.269	.055	.009	-.007	1	.141	.531 ^{**}	.141	.363
	Sig. (2-tailed)	.113	.748	.960	.965		.411	.001	.411	.029
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan6	Pearson Correlation	.065	.255	.040	.089	.141	1	.337	.299	.499 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.707	.134	.817	.604	.411		.045	.077	.002
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan7	Pearson Correlation	.089	.229	.131	-.047	.531 ^{**}	.337	1	.337	.539 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.604	.179	.446	.784	.001	.045		.045	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan8	Pearson Correlation	.416	.369	.040	-.158	.141	.299	.337	1	.594 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.012	.027	.817	.357	.411	.077	.045		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	.404	.717 ^{**}	.385	.472 ^{**}	.363	.499 ^{**}	.539 ^{**}	.594 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.015	.000	.020	.004	.029	.002	.001	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Sumber: Output Program SPSS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan yaitu pernyataan nomor 1 sampai nomor 8 secara berturut-turut yaitu 0,015, 0,000, 0,020, 0,004, 0,029, 0,002, 0,001, dan 0,000. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian untuk variabel Y valid karena hasilnya kurang dari taraf signifikansi (α)= 5% ($< 0,05$). Jadi kesimpulannya butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dalam mendapatkan data penelitian, baik pada waktu sekarang, maupun yang akan datang. Uji reliabilitas menggunakan metode *chronbach's alpha*. Nilai *chronbach's alpha* minimal adalah 0,60.

- a. Hasil Uji reliabilitas variabel sumber daya manusia (X1)

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sumber Daya Manusia
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.684	6

Sumber: hasil output program SPSS

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pernyataan untuk variabel sumber daya manusia dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,684.

Hal ini berarti bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, artinya bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

- b. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2)

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.698	8

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pernyataan untuk variabel sumber daya manusia dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,698.

Hal ini berarti bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, artinya bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

- c. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.702	6

Sumber: hasil output program SPSS

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pernyataan untuk variabel sumber daya manusia dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,702.

Hal ini berarti bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, artinya bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

- d. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.644	8

Sumber: hasil output program SPSS

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pernyataan untuk variabel sumber daya manusia dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,644.

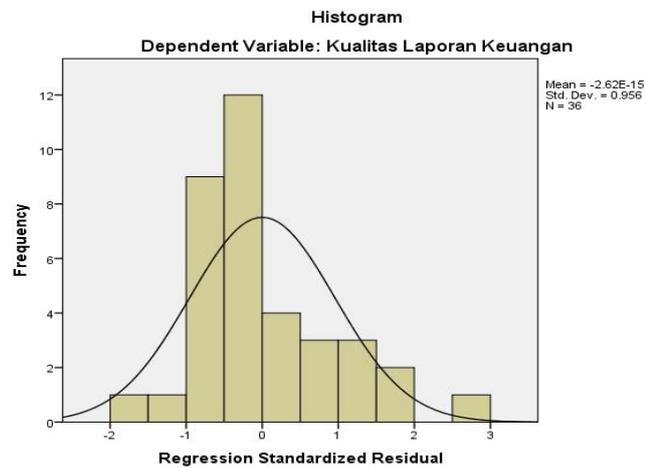
Hal ini berarti bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, artinya bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

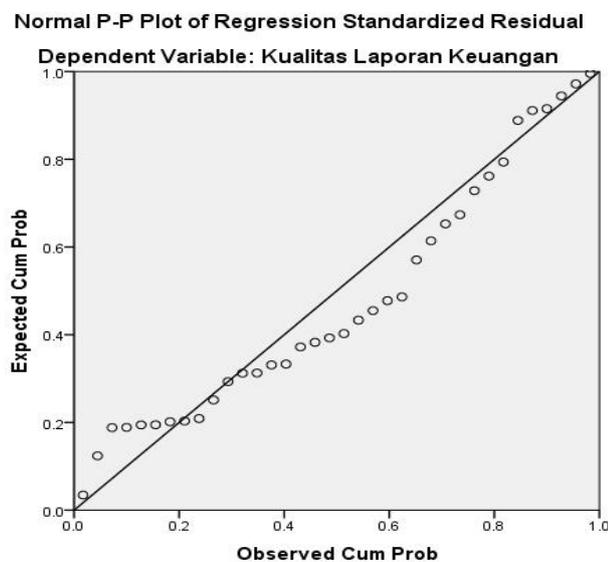
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan program SPSS.

Gambar 4.1
Grafik Histogram Uji Normalitas



Berdasarkan grafik histogram diatas terlihat bahwa semua diagram batang yang terbentuk masih mengikuti garis lonceng atau garis gelombang sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Gambar 4.2
Grafik Scatterplot Uji Normalitas



Berdasarkan grafik scatterplot diatas terlihat bahwa penyebaran titik-titik masih mengikuti garis miring (diagonal) sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Kriteria penentuan multikolinieritas adalah apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 ($> 0,1$) jika nilai *tolerance* dibawah 0,1 maka terjadi multikolinearitas dan nilai VIF (*variance influenced factor*) harus lebih kecil dari 10 jika diatas 10 maka telah terjadi multikolinearitas. Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.533	.604		2.536	.016		
	Sumber Daya Manusia	-.027	.104	-.037	-.260	.796	.806	1.240
	Sistem Pengendalian Internal	.149	.125	.172	1.195	.241	.796	1.256
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.527	.112	.632	4.700	.000	.914	1.094

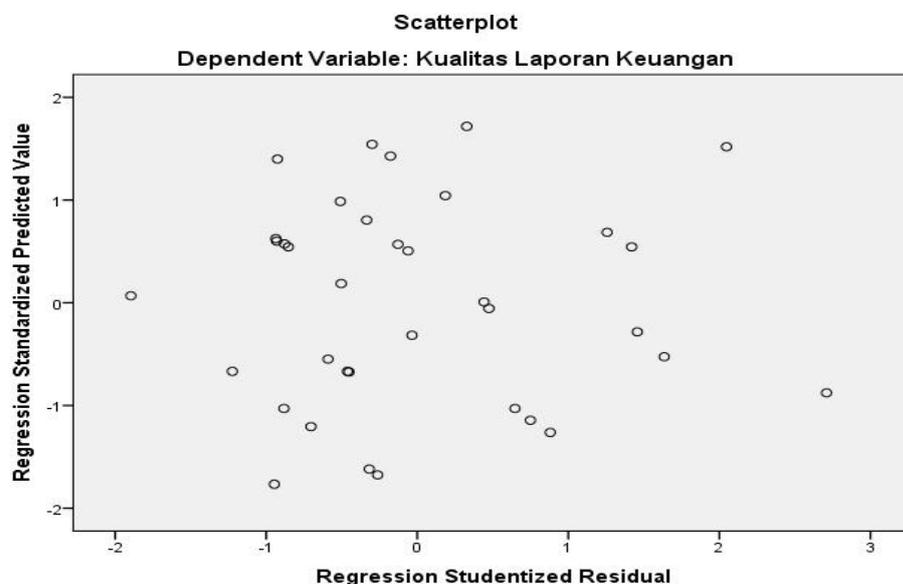
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 ($> 0,10$). Hasil pengujian nilai VIF (*variance influenced factor*) juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10 (< 10). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitasnya:

Gambar 4.3
Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik scatterplot diatas tidak terdapat pola-pola khusus yang dibentuk oleh titik-titik dan penyebaran titik-titiknya hampir merata disemua tempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain datanya homokedastisitas.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Berikut merupakan hasil pengujian regresi linear berganda:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.533	.604		2.536	.016		
	Sumber Daya Manusia	-.027	.104	-.037	-.260	.796	.806	1.240
	Sistem Pengendalian Internal	.149	.125	.172	1.195	.241	.796	1.256
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.527	.112	.632	4.700	.000	.914	1.094

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,533 + (-0,027X_1) + 0,149X_2 + 0,527X_3 + e$$

$$Y = 1,533 - 0,027X_1 + 0,149X_2 + 0,527X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 1,533 menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka Kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda adalah sebesar 1,533.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar -0,027 (negatif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan kompetensi sumber daya manusia akan menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan sebesar 0,027 atau sebesar 2,7% tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,149 (positif) artinya disetiap terjadi kenaikan sistem pengendalian internal di BPKAD maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Samarinda sebesar 0,149 atau sebesar 14,9% tanpa dipengaruhi oleh faktor lainnya.
4. Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,527 (positif) artinya disetiap terjadi kenaikan penerapan standar akuntansi pemerintahan di BPKAD maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Samarinda sebesar 0,527 atau sebesar 52,7% tanpa dipengaruhi oleh faktor lainnya.

F. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Hasil pengujian analisis statistik t akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.533	.604		2.536	.016
	Sumber Daya Manusia	-.027	.104	-.037	-.260	.796
	Sistem Pengendalian Internal	.149	.125	.172	1.195	.241
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.527	.112	.632	4.700	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi statistik t pada tabel di atas terlihat bahwa variabel sumber daya manusia (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,796 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y (kualitas laporan keuangan). Sedangkan Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,241 artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem pengendalian internal (X2) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan). Hasil uji statistik t untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X3) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X3) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan).

G. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen atau Berikut disajikan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 ^a	.471	.421	.17383

Sumber: hasil output program SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,421 atau (42,1%) yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 42,1%. Atau dengan kata lain variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 42,1% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.14, diperoleh nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar $-0,027$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi sumber daya manusia adalah $0,796 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **ditolak**.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.14, diperoleh nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar $0,149$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi sistem pengendalian internal adalah $0,241 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **ditolak**.

3. Pengaruh Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.14, diperoleh nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar $0,527$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan telah diperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber daya manusia berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar $-0,027$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi sumber daya manusia berdasarkan uji t adalah $0,796 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **ditolak**.
2. Sistem pengendalian internal berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar $0,149$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi sistem pengendalian internal adalah $0,241 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **ditolak**.

3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan hasil analisis regresi nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 0,527. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Samarinda hendaknya dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terutama dibidang keuangan atau akuntansi karena mereka yang bertugas menghasilkan laporan keuangan, lebih meningkatkan sistem pengendalian internal karena berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dilingkungan pemerintah masih sangat lemah, dan lebih memahami dan menaati standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan objek lain serta dapat menambah variabel lain agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Belkaoui, Ahmed. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harto, Puji dan Tantriana Sukmaningrum. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Jurnal Akuntansi Pemerintahan.

- Bpk RI, Ikhtisar Pemeriksaan Semester III tahun 2015, <http://www.bpk.go.id>, September 2016
- Wikipedia Indonesia, Manajemen Sumber Daya Manusia, <http://id.wikipedia.org>, diakses pada September 2015
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Gianyar)*. E-Junal Akuntansi. Universitas Udayana. Bali.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Taknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi*

Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-Journal S1 Akuntansi. Volume 2. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.

Windiastuti, Ruri. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.*